

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indeks Pembangunan Manusia ialah aspek penting guna mengukur kemajuan ekonomi negara (Setiawan & Fikriah, 2020). Negara dengan IPM yang tinggi dapat dikategorikan sebagai negara perekonomian stabil dan masyarakat yang produktifitasnya tinggi sehingga akan menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan suatu negara selain dapat terlihat dari pendapatan negara yang terus memiliki peningkatan juga terlihat dari kualitas SD yang semakin meningkat (Sari, 2024).

IPM menjadi sektor yang paling dasar dalam pembangunan (Rifa & Waluyo, 2023). SDM yang berkualitas ialah modal awal pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sebuah inovasi serta meningkatkan daya saing dengan cara dapat memaksimalkan penggunaan teknologi yang memiliki tingkat kebaruan yang tinggi.

Pembangunan manusia yang meningkat akan menyebabkan bertambahnya populasi dan akan meningkatkan tingkat konsumsi negara serta berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara (Efendi et al., 2024). Dengan adanya peningkatan pembangunan manusia akan memperbaiki kualitas hidup manusia serta dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya sumber daya manusia akan membuat daya saingnya semakin tinggi. Tingginya kualitas manusia dapat mendorong perekonomian disuatu wilayah supaya ke arah yang baik (Jati & Iriani, 2023). pembangunan manusia yang optimal nantinya dapat memaksimalkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Hal tersebut

disebabkan karena sdm yang berkualitas dapat beradaptasi dengan cepat serta memiliki tingkat inovatif dan produktif yang tinggi.

Manusia merupakan elemen paling penting dalam proses produksi (Onabote et al., 2023). Sumber daya alam tidak dapat bernilai ekonomis apabila tidak ada manusia yang mengolahnya yang awalnya sebagai input menjadi output. Manusia memiliki kreativitas yang dapat mengolah dan mengubah sumber daya alam yang awalnya memiliki nilai ekonomis yang rendah menjadi produk bernilai jual tinggi.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktifitas serta memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis yang baik. Kemampuan penduduk dalam penyerapan dan pengelolaan banyak sumber pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari tingginya nilai pembangunan manusia, baik secara teknologi atau kelembagaan yang menjadi sarana untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi. (Utami, 2020).

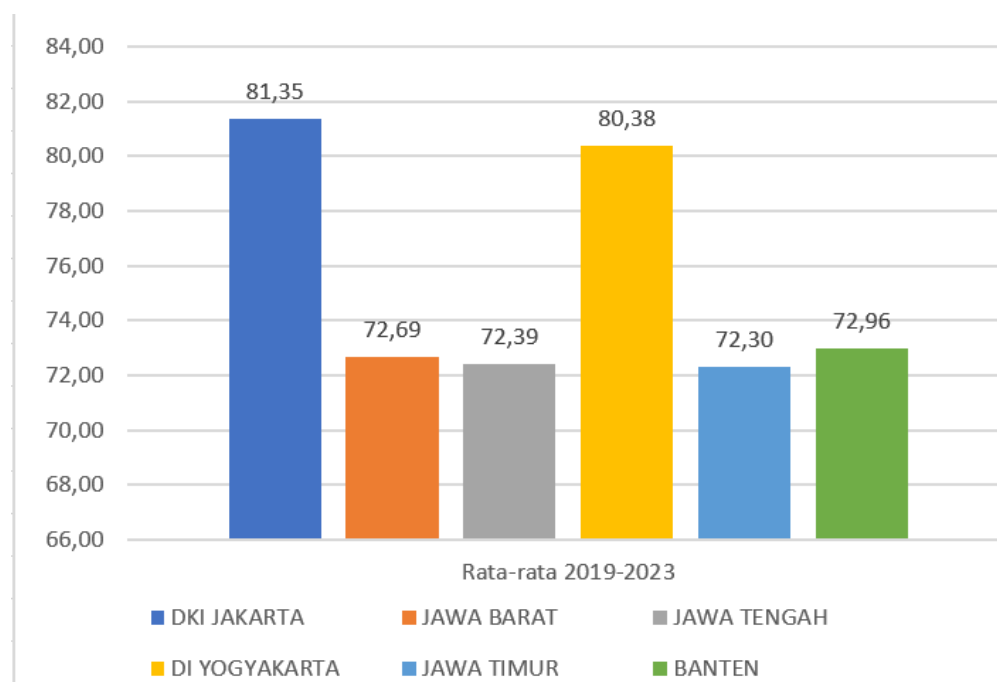
SDM dengan produktifitas yang tinggi berpeluang mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera yang bisa dilihat dari besarnya pendapatan yang didapat maupun tingkat konsumsi yang sudah dikeluarkannya (Sinta & Fahrati, 2022). Produktifitas yang tinggi mencerminkan kemampuan sumber daya tersebut dalam menghasilkan output dengan optimal dan juga efisien dan berpeluang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Tingginya nilai IPM menunjukkan bahwa pemerintah memberikan investasi pembangunan yang terpusat pada manusia yang memiliki tujuan untuk mendorong produktivitas. Negara dengan nilai IPM yang tinggi bisa dikategorikan bahwa negara tersebut mempunyai kualitas SDM yang menuju sempurna

(Wardhana et al., 2021). Menurut UNDP, IPM terbentuk memiliki 3 dasar yang merupakan: Umur Panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak.

UNDP memberikan 4 klasifikasi golongan ip macam yaitu: *low* (HDI < 60), *lower-medium* (HDI 60-70), *upper-medium* (HDI 70-80) dan *high* (HDI > 80) (Angkat, 2023).

Gambar 1. 1 Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023



Sumber: BPS.go.id, Diolah

Dari gambar 1.1 menunjukkan rata-rata indeks pembangunan manusia ke enam provinsi yang berada di Pulau Jawa dari Tahun 2019-2023. Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata terendah dari enam Provinsi di Pulau Jawa dengan nilai rata-rata sebesar 72,30, Provinsi Jawa Tengah berada di posisi kelima dengan rata-rata sebesar 72,39, Provinsi Jawa Barat berada di posisi keempat dengan rata-rata 72,69, Provinsi Banten berada di posisi ketiga dengan rata-rata 72,96, Provinsi DI

Yogyakarta berada di posisi kedua dengan rata-rata sebesar 80,38, Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan rata-rata 81,35. Dari seluruh pulau Jawa, provinsi yang memiliki nilai IPM tergolong tinggi hanyalah Jakarta dan Yogyakarta yang masing-masing nilai IPM di tahun 2023 83,08 dan 81,55. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kualitas sdm menuju yang terbaik. Hal tersebut bisa dilakukan melalui upaya pemerataan pembangunan dari kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Agar indeks pertumbuhan manusia meningkat pemerintah harus menyusun sebuah kebijakan yang dinilai mampu dalam mengoptimalkan pencapaian ke jenjang lebih tinggi. Kebijakan fiskal berpengaruh besar terhadap hasil tujuan, yaitu dengan melalui kebijakan belanja. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan terwujud dengan adanya alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan guna mendukung peningkatan pembangunan sdm (Laode et al., 2020). Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan belanja sesuai fungsi pendidikan dan kesehatan bertambah setiap tahunnya, hal tersebut dilaksanakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas pembangunan manusia.

Peningkatan kualitas SDM Indonesia didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendidikan berfungsi sebagai persiapan manusia, persiapan tenaga kerja, dan warga yang baik (Djuhartono et al., 2022). Dengan adanya pendidikan, manusia akan mendapatkan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai penunjang menuju kehidupan yang lebih baik.

Sektor pendidikan mendapatkan anggaran sebesar 20% dari APBN pemerintah. Investasi pemerintah pada sektor pendidikan akan berdampak kepada pembangunan pendidikan, karena dengan menyelesaikan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi maka akan meningkatkan pengetahuan serta dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (Hasibuan & Syahbudi, 2022).

Sektor pendidikan apabila tidak diperhatikan oleh pemerintah maka masyarakat tidak memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya masing masing dan berdaya saing rendah. Kualitas sosial-ekonomi, Kesehatan, dan gizi yang baik akan mengalami penurunan apabila tidak ada masyarakat yang mendapatkan pendidikan berkualitas (Imelda et al., 2021).

Pemerintah memiliki peran meningkatkan kualitas sdm dengan adanya kebijakan pengeluaran anggaran di sektor pendidikan dan Kesehatan. UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 11 ayat (5) dan dalam keputusan MK No. 35/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa terdapat dua klasifikasi belanja pemerintah pusat yaitu berdasarkan fungsi dan organisasi. Belanja pemerintah dari fungsi terdiri dari 11 yakni aspek dalam pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zahara et al., 2020).

Menurut David dan Nasri dalam Mahendra (2020) Pengeluaran pemerintah dipergunakan untuk memberikan dana dari sektor-sektor publik yang memiliki potensi menaikkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas sdm, diantaranya menjadikan investasi sektor pendidikan dan Kesehatan ialah prioritas utama guna mencapai pembangunan kualitas sdm berdasarkan IPM.

Tingkat pendidikan yang bagus akan menghasilkan sumber daya yang berdaya saing tinggi serta memiliki inovasi.

Indikator pendukung IPM selanjutnya adalah faktor Kesehatan. Peningkatan kesehatan ialah kunci keberhasilan kualitas hidup masyarakat guna pembangunan negara (Wardhana et al., 2021). Kesehatan akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pendidikan adalah cara guna meraih kehidupan layak, dari kedua hal tersebut akan membentuk kapabilitas manusia.

Anggaran pada sektor kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah adalah 5 persen dari APBN. Anggaran tersebut dipersiapkan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan diharapkan bisa menunjang kesehatan masyarakat dan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Proporsi anggaran belanja modal yang rendah memiliki kemungkinan memperlambat pembangunan ekonomi, jadi kemungkinan ketergantungan perekonomian daerah terhadap belanja rutin pemerintah yang memiliki efektifitas rendah sangat tinggi.

Gambar 1. 2 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, diolah (2025)

Gambar 1.2 memberikan gambaran terjadinya kenaikan dari anggaran fungsi kesehatan dan pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada belanja pemerintah di sektor pendidikan terdapat penurunan anggaran pada tahun 2019 namun pada tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan anggaran. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap pembangunan manusia menurut mongan dalam jurnal (Setiawan & Fikriah, 2020) diberikannya pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang kemudian di amandemen ditahun 2009, Negara memberi amanat untuk bidang kesehatan diberikan alokasi dana minimal 20% dari total APBN dan APBD. Pengalokasian bidang kesehatan diatur pada UU No. 36 Th. 2009 pasal 171 yang memberikan amanat untuk bidang kesehatan diberikan alokasi dana minimal 5% dari APBN, dan minimal 10% dari APBD masing-masing daerah.

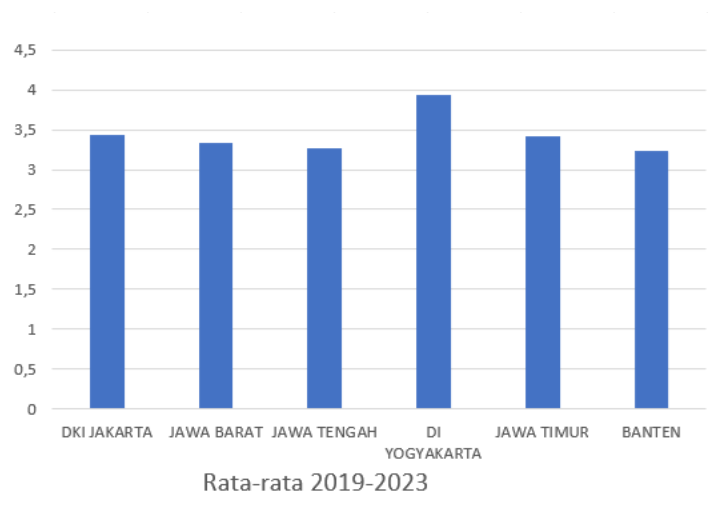
Pemerintah dapat melaksanakan pembelanjaan pembangunan sebagai Langkah untuk menjalankan fungsinya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Persoalan tersebut bisa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan yang mendasar layaknya pendidikan dan Kesehatan. Dengan dipenuhinya kebutuhan dasar tersebut maka secara otomatis terdapat peningkatan kualitas sdm.

Selain belanja pemerintah sektor pendidikan dan Kesehatan, masih ada faktor lain yang dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas sdm adalah pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ini berkaitan erat dengan produktivitas masyarakat. Meningkatnya produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Irawan et al., 2022).

Dari administratif, Provinsi Jatim memiliki 29 Kab dan 9 Kota. Jatim jadi provinsi dengan kab/kota terbanyak. Namun hal tersebut tidak didukung dengan pembangunan manusia yang tinggi. Di Jatim hanya memiliki 7 Kabupaten/Kota dengan Indeks Pembangunan Manusianya tergolong tinggi. Jawa Timur menjadi pusat pertumbuhan industri maupun petrdagangan karena posisinya yang strategis yaitu diantara Jawa Tengah dan Bali.

Gambar 1. 3 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, diolah

Dari data tersebut, selama lima tahun terakhir di 2019-2023 rata-rata per tahun laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan Jawa Timur adalah 3,41. Dibandingkan dengan provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, Provinsi Jatim memiliki peringkat 3 laju pertumbuhan tertinggi se Jawa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjodi, 2018) mengatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang memiliki arti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah tersebut mampu mendorong dalam peningkatan sdm. Penelitian (Hasibuan & Syahbudi, 2022) mengungkapkan terdapat pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan IPM.

Permasalahan terkait IPM ini bersifat nasional sehingga diperlukan adanya keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan dari faktor yang heterogen dan berkemungkinan memiliki pengaruh terhadap kualitas sdm. Dari latar belakang penulis tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah belanja sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa timur?
2. Apakah belanja sektor kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa timur?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh belanja sektor pendidikan, Kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM Provinsi Jawa Timur. Pemilihan provinsi ini berdasarkan pertimbangan bahwa provinsi ini memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah kedua.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemda

Diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemda dan perumusan dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan IPM.

2. Bagi Peneliti selanjutnya dan Pembaca

Bisa menjadi referensi atau sumber acuan untuk memperkuat pernyataan dalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda namun pada tema dan pembahasan yang sama.